

Siaran Pers

Pembangunan IKN Penggerak Ekonomi Regional dan Nasional

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mendorong pembangunan di Kalimantan Timur dapat berkontribusi dalam upaya Indonesia lepas dari *Middle Income Trap* di 2036. Terlebih Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan dan penggerak ekonomi di Indonesia. “Kalau kita lihat di sini bagaimana Kalimantan Timur bisa berkontribusi terhadap nasional, salah satunya dengan pembangunan Ibu Kota Negara. Mudah-mudahan bisa direalisasikan sehingga bisa meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan strategis,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutannya di Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Timur, Kamis (22/4).

Menteri Suharso juga menekankan pentingnya pemeliharaan lingkungan dalam pembangunan IKN, terlebih peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, pembangunan IKN akan menekankan inovasi hijau. Pembangunan di wilayah pendukung IKN juga penting diperhatikan. Kota Samarinda diharapkan dapat membangun sektor energi berkelanjutan dan menjadi percontohan daerah lain. Terlebih pada 2030, banyak negara yang hanya menerima produk yang dihasilkan dari energi bersih. Kota Balikpapan juga ditargetkan dapat menjadi industri petrokimia terbesar di dunia. “Inilah rancangan Indonesia-sentris itu. Pada saat yang sama Kalimantan Timur harus mempertahankan paru-paru dunia. Ini adalah *Major Project* di Kalimantan Timur,” ujar Menteri Suharso.

Beberapa isu strategis di Kalimantan Timur juga menjadi salah satu fokus pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. “Fokus mulai dari industri sampai pendidikan. Yang belum termuat adalah pembangunan rendah karbon dan digitalisasi ekonomi. Padahal ini erat kaitannya dengan kehadiran Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur,” imbuh Menteri Suharso. Kementerian PPN/Bappenas memberi juga rekomendasi terhadap isu yang harus diatasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur, antara lain diversifikasi sektor usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan, hingga perlindungan dari bencana, dan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.

“Dari semua rekomendasi, isu diversifikasi sektor usaha dan perluasan kesempatan kerja menjadi yang utama karena sebagian besar masih bertumpu pada SDA yang belum terdiversifikasi dan lapangan kerja yang belum optimal,” tutup Menteri Suharso. Dengan fokus pembangunan tersebut diyakini mampu menggerakkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,3 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan menjadi 5,92 persen sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6 - 6,5 persen.

Jakarta, 22 April 2021

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31934283; Faks.: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id